

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan atas penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut PSAK No.1 Tahun 2015 laporan keuangan merupakan suatu posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu instansi yang disajikan secara terstruktur. Laporan keuangan disusun dan disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD yang dibuat harus memperhatikan kualitasnya sehingga bisa dipergunakan sebagaimana mestinya bagi pihak internal maupun eksternal dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan hasil pelaporan dari setiap transaksi serta keadaan keuangan dari suatu entitas. Laporan keuangan yang disusun harus dapat dipahami oleh penggunaannya sehingga sangat perlu untuk memperhatikan kualitas dari LKPD. Pemerintah daerah juga dituntut agar dapat bekerja secara efisien dan efektif agar laporan pertanggungjawaban yang disusun dalam bentuk LKPD juga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila memenuhi empat karakteristik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yaitu relevan,

andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Untuk melihat kualitas dari LKPD yang telah disusun oleh pemerintah daerah maka diperlukan opini dari BPK untuk menilai apakah laporan keuangan tersebut dikatakan berkualitas. Berikut opini yang diberikan oleh BPK menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan opini tertinggi, Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tidak wajar, dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Sudah banyak daerah yang memperoleh opini WTP dari BPK namun ada pula yang masih mendapatkan opini WDP.

Penyajian laporan keuangan oleh suatu entitas seperti di dalam pemerintahan harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Aspek ini merupakan hal penting yang perlu diperhatikan sehingga semua pengelolaan keuangan dapat diketahui oleh semua pihak. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya penyalahgunaan keuangan dan APBD yang telah disusun oleh pemerintah beserta DPRD. Maka, aspek di atas sangat diperlukan agar kinerja pemerintah bebas dari isu-isu dan dalam pelaporan keuangan diharapkan dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas LKPD.

Kualitas LKPD dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI). Diatur dalam PP No. 60 tahun 2008 bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah suatu proses yang integral dari tindakan dan kegiatan oleh pimpinan serta semua pegawai yang dilakukan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara serta

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adanya SPI membantu pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan dan program secara konsisten dan tetap terkoordinasi dengan baik. Dengan terkoordinasinya kegiatan dan program pemerintah daerah, maka diharapkan terciptanya kepatuhan terhadap tugas dan tanggung jawab terutama dalam melaporkan hasil kegiatan dalam LKPD, dengan harapan LKPD yang dibuat dan disusun berkualitas sehingga tercermin juga pemerintahan dengan kinerja yang baik.

Faktor kedua pendukung kualitas LKPD adalah transparansi. Menurut Mardiasmo (2009) bahwa transparansi merupakan suatu keterbukaan dari pemerintah dalam pemberian informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Dengan adanya transparansi maka diharapkan semua informasi yang telah disusun dalam bentuk laporan keuangan dapat diakses untuk pihak yang membutuhkan baik dalam lingkungan internal maupun eksternal pemerintah daerah. Maka dari itu, informasi dalam bentuk laporan keuangan tersebut harus disusun dengan memperhatikan kualitas agar pengguna laporan keuangan dapat memanfaatkan informasi yang ada untuk kepentingan masing-masing pengguna.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) juga dapat mempengaruhi kualitas LKPD. Menurut Fathoni (2006) SDM adalah kegiatan manusia yang dianalisis dan dikembangkan dengan melihat unsur terpenting yaitu modal dan kekayaan, pemanfaatan secara optimal untuk waktu, tenaga dan kemampuan oleh organisasi dan kepentingan individu. Semakin baik kualitas dari SDM maka akan semakin baik pula kinerjanya dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab secara

cepat dan efisien. Hal ini dapat mempengaruhi pelaporan keuangan karena apabila pelaporan keuangan semakin cepat maka pengambilan keputusan juga akan menjadi semakin cepat (Mardiasmo, 2002).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asril (2017) menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) serta SPI pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD Kota Medan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Wardani (2017) menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD, pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas LKPD, serta penerapan SIAKD dan pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD pada SKPD Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian oleh Septiningtyas (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan SPI tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD, sedangkan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kendal. Penelitian oleh Triyanti (2017) menyatakan bahwa kompetensi SDM di bidang akuntansi dan SPI berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas LKPD pada SKPD di Kabupaten Malang. Penelitian lain yang dilakukan oleh Amalia (2017) menyatakan bahwa pemahaman SAP, transparansi, dan pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Medan.

Hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten mendorong peneliti untuk menguji kembali serta menggabungkan faktor-faktor pada penelitian terdahulu

yaitu Sistem Pengendalian Internal, transparansi, serta kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas LKPD dengan objek berbeda. Pada penelitian ini, peneliti memilih Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar sebagai objek penelitian karena berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD tahun 2020 bahwa Kota Makassar mendapatkan opini WDP setelah lima tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP dari BPK. Dari hasil pemeriksaan BPK bahwa terdapat beberapa masalah yang ditemukan terkait dengan LKPD diantaranya menyajikan saldo kas di BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) sebesar Rp 3,68 miliar, dimana nilai tersebut termasuk panjar untuk kegiatan dan pinjaman pribadi tahun 2019 dan 2020 sebesar Rp 452, 61 juta yang tidak dipertanggungjawabkan dan tidak disetor ke kas BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) RSUD Daya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Adapun masalah lain yang menjadi catatan rekomendasi oleh BPK adalah kegiatan sewa jaringan CCTV terintegrasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2020 melebihi nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang ditetapkan yaitu kelebihan pembayaran sebesar Rp1.800.000, tidak sesuai spesifikasi Rp273.000.000, dan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp584.100.000 (mediaindonesia.com).

Wali Kota Makassar juga ikut bereaksi atas opini BPK tersebut karena laporan tersebut yang menyebabkan pengelolaan keuangan menjadi kurang baik pada OPD Kota Makassar (sulsel.suara.com). Maka dari itu, pemerintah didorong dan dimotivasi oleh LHP untuk lebih meningkatkan tata kelola keuangan serta

pelaporan keuangan untuk menciptakan transparansi terhadap LKPD. Perlu juga adanya pengawasan internal serta adanya SDM yang berkompetensi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengangkat judul penelitian **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar.”**

1.2. Rumusan Masalah

Pemerintah Kota Makassar mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK setelah lima tahun berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat masalah yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas LKPD. Masalah yang terjadi menceminkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar masih kurang baik. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD di antaranya sistem pengendalian internal, transparansi serta kompetensi sumber daya manusia. Sistem pengendalian internal bertujuan untuk memberi keyakinan atas pencapaian tujuan pemerintah secara efektif dan efisien serta menciptakan pelaporan keuangan yang andal dalam meningkatkan kualitas LKPD. Adanya transparansi mendorong pemerintah untuk membuat dan melaporkan LKPD dengan mengutamakan kualitas sehingga memberi keyakinan bagi masyarakat atas pengelolaan sumber daya publik. Diperlukan juga kompetensi sumber daya manusia yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehingga tercapainya pelaporan keuangan

yang efektif dan efisien dan adanya kinerja yang baik dalam usaha peningkatan kualitas LKPD.

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Internal (SPI) berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar?
3. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta hasil penelitian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji kembali pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI), transparansi, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan objek berbeda yaitu Kota Makassar.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan menjadi sumber pengetahuan mengenai kualitas laporan keuangan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya menjadi bahan referensi tambahan untuk dapat dikembangkan lagi.

b. Manfaat Praktik

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah sebagai bahan masukan dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kembali kualitas laporan keuangannya.

